KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 8 4					
			H.1					Final	
			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDI	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	N YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 8 3 0 1 8 8 2 6 4 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 N	A.3 Nama : YOSA SHANTIKO BAHARI								
B. PF	h PASAL 21	I YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJ		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	1	21-402-01		6.494.900	6.494.900	0	5	324.745	
Keter	angan Kode C	Objek Pajak : H	nor dan	Imbalan Lain yang Di	ibebankan kepada APBN atau	APBD yang Diter	ima oleh PN	IS, Anggota	
B.8	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 55								
	Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor : Tanggal dd mm yyyy								
B.10	B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	3.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. ID	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2									
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :				\Box				
C.4	c.4 Tanggal :		2 6	2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :			HARI	HARI JUMADI					
C.6	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							benar dan telah saya	
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	l berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

51JW89WD